Penyusunan Laporan Keuangan dan SPT Tahunan Wajib Pajak UMKM

Umi Nandiroh, Universitas Islam Malang

Irma Hidayati, Universitas Islam Malang

Nuril Badria, Universitas Islam Malang

Abstract:

The low tax compliance of MSMEs is due to tax policies that are too burdensome for them. Tax regulations are burdensome for MSMEs, thus affecting the growth of this sector. Facts on the ground show that MSME actors often feel bothered by the applicable tax provisions. Starting from the complexity of tax administration, which must be passed in carrying out tax obligations. Plus the low competence of SMEs in preparing financial reports, as a basis for calculating taxes, and attachments in reporting Annual Tax Returns (Annual SPT). This is the reason behind the existence of this service activity. The aim is to conduct socialization, training, and assistance to MSME actors in compiling financial reports and reporting Annual SPTs. Where this service is carried out in the MSME community in the Blimbing sub-district, Malang City. This activity lasts for 3 months, from January to March 2022. The stages carried out are in the form of socialization, training in the preparation of MSME financial reports, and SPT Reporting Assistance. This service activity has succeeded in increasing MSME tax compliance. And MSMEs who are participants in this activity feel very helpful, in compiling financial reports, as controls in financial management, and reporting SPT.

Keywords: Financial Statements, MSMEs, Tax Liability, SPT.

Abstrak:

Rendahnya kepatuhan pajak UMKM ini disebabkan karena kebijakan pajak yang terlalu memberatkan mereka. Peraturan perpajakan yang memberatkan bagi UMKM, sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor ini. Fakta di lapangan, menunjukkan bahwa para pelaku UMKM sering merasa direpotkan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Mulai dari kompleksnya administrasi perpajakan, yang harus dilalui dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Ditambah lagi rendahnya kompetensi UMKM dalam menyusun laporan keuangan, sebagai dasar perhitungan pajak, dan lampiran dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Alasan itulah yang melatar belakangi adanya kegiatan pengabdian ini. Tujuannya adalah untuk melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kepada pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan dan melaporkan SPT Tahunan. Yang mana pengabdian ini dilakukan di komunitas UMKM kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kegiatan ini berlangsung selama 3 bulan, dari bulan Januari sampai dengan Maret 2022. Tahapan yang dilakukan berupa Sosialisasi, Pelatihan Penyusunan Laporan keuangan UMKM, dan Pendampingan Pelaporan SPT. Kegiatan pengabdian ini sukses meningkatkan kepatuhan perpajakan UMKM. Dan UMKM yang menjadi peserta dalam kegiatan ini merasa sangat terbantu, dalam menyusun laporan keuangan, sebagai pengendalian dalam manajemen keuangan, dan pelaporan SPT.

Keywords: Laporan Keuangan, UMKM, Kewajiban Pajak, SPT

Email : uminandiroh@unisma.ac.id

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dan terbukti mampu bertahan dalam badai krisis moneter tahun 1997. Pada krisis global tahun 2008, UMKM juga justru menjadi penyelamat ekonomi nasional dari keterpurukan. Potensi UMKM dilihat dari tingkat pertumbuhannya juga menunjukkan grafik yang terus meningkat. Pertumbuhan jumlah UMKM dari tahun 2015 sampai tahun

2020 meningkat sekitar 20,2% (Gupta & Arora, 2019). Sayangnya terdapat miss match antara potensi yang tinggi dari UMKM dengan kepatuhan pajaknya. Penerimaan pajak total yang memiliki porsi 80% lebih terhadap APBN, kontribusi UMKM hanya sebesar kurang lebih 0,5% (Aneswari, 2018). Per Juni 2013 jumlah UMKM adalah 55,2 juta, namun yang baru terdaftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hanya sekitar 13-16 juta (Sari, 2018).

Rendahnya kepatuhan pajak UMKM ini disebabkan karena kebijakan pajak yang terlalu memberatkan mereka. Peraturan perpajakan yang memberatkan bagi UMKM, sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor ini. Penelitian Nisa et al., (2020) menunjukkan UMKM di Indonesia memiliki potensi tinggi namun mengalami kesulitan besar karena kebijakan pajak yang memberatkan mereka. Rekomendasi yang diberikan adalah agar pemerintah memberikan kebebasan pajak bagi UMKM yang baru berjalan.

Fakta di lapangan, menunjukkan bahwa para pelaku UMKM sering merasa direpotkan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Mulai dari kompleksnya administrasi perpajakan, yang harus dilalui dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Ditambah lagi rendahnya kompetensi UMKM dalam menyusun laporan keuangan, sebagai dasar perhitungan pajak, dan lampiran dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan).

Kebutuhan yang tinggi terhadap Teknologi telah memungkinkan banyak orang untuk belajar dan mengikuti perkembangan teknologi yang semakin kompleks untuk mengikuti tren yang sedang berlangsung dan tuntutan yang semakin meningkat dengan memanfaatkan teknologi internet (Mardiana et al., 2020), salah satu bentuk kemajuan teknologi, bidang kearsipan, memiliki inovasi baru dalam pengarsipan data. Dengan file elektronik, dikatakan lebih praktis dan kurang berisiko. Teknologi tersebut telah digunakan oleh berbagai institusi dan bisnis (Noch & Pattiasina, 2017). Dalam hal perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak menggunakan file elektronik untuk semua layanan dokumennya. Hal ini merupakan salah satu reformasi yang dilakukan oleh Administrasi Negara dalam sistem perpajakan untuk memfasilitasi, meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas pelayanan bagi wajib pajak. Namun masih banyak wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam menerapkan sistem baru ini.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku otoritas pajak di Indonesia, telah menyadari berbagai kesulitan ini. Untuk itu, berbagai upaya telah dilakukan, salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas Penghasilan Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Besaran Peredaran Bruto (omzet) yang dimaksud dalam PP ini adalah kurang dari 4,8 miliar per tahun, atau dengan kata lain sasaran dari PP ini adalah UMKM. Berdasarkan PP tersebut, perhitungan pajak yang harus dibayarkan oleh UMKM, adalah 05% dari omzet per bulan. Tujuan dari dikeluarkannya PP ini, salah satunya adalah untuk menyederhanakan kewajiban perpajakan, dalam hal pembukuan. Karena besarnya pajak dihitung dari omzet, bukan dari laba, untuk itu sekalipun pelaku UMKM tidak menyusun laporan laba rugi, perhitungan pajak tetap bisa dilakukan. Selain itu pada PP ini tidak ada kewajiban melampirkan laporan keuangan dalam melaporkan SPT Tahunan, cukup melampirkan bukti pembayaran pajak penghasilan per bulan.

Namun, PP 23 2018 ini hanya bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM yang berbentuk orang pribadi, selama 7 tahun. Setelahnya UMKM kembali harus mengikuti aturan normal (UU No 36 Tahun 2008, tentang Pajak Penghasilan), yang mana pajak terutang dihitung berdasarkan laba bersih, dan kewajiban melampirkan laporan keuangan dalam SPT Tahunan. Hal ini diberlakukan, lantaran pemerintah ingin mendorong agar

pelaku UMKM dapat naik kelas. Yaitu usaha mikro dapat bertumbuh menjadi usaha kecil, usaha kecil dapat bertumbuh menjadi usaha menengah, dan usaha menengah menjadi usaha besar. Untuk itu pelaku UMKM wajib belajar dan mampu membuat pembukuan, sampai menghasilkan laporan keuangan.

Alasan itulah yang melatar belakangi adanya kegiatan pengabdian ini. Tujuannya adalah untuk melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kepada pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan dan melaporkan SPT Tahunan. Yang mana pengabdian ini dilakukan di komunitas UMKM kecamatan Blimbing, Kota Malang.

METODE KEGIATAN

Rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM masih menjadi persoalan yang serius bagi pemerintah. Pasalnya, penerimaan Negara sangat terpengaruh oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemerintah, khususnya DJP telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan ini, salah satunya dengan menggandeng akademisi untuk bisa berperan aktif memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk mau memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah manifestasi dari turut aktifnya kalangan akademisi, dalam mendukung program pemerintah, melalui pendampingan kepada wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, mulai dari menghitung pajak terutang, membayar pajak dengan e-Billing, dan melaporkan SPT Tahunan melalui e-Filling. Sehingga wajib pajak UMKM tidak mengalami kesulitan saat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Adapun tahapan – tahapan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Tahap Sosialisasi
Sosialisasi dilakukan dengan tujuan menyampaikan tujuan dari kegiatan pengabdian ini. Dalam tahapan sosialisasi juga akan dilakukan wawancara, guna menggali lebih dalam permasalahan yang dihadapi WP UMKM, agar model pendampingan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
2. Tahap Penyuluhan
Pada tahap penyuluhan ini, tim pengabdian akan menyampaikan terkait dengan urgensi penyusunan laporan keuangan, kewajiban perpajakan, urgensi pelaporan SPT, dan ketentuan pelaporannya.
3. Tahap Pelatihan
Tahapan pelatihan akan dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama, adalah pelatihan penyusunan laporan keuangan. Karena laporan keuangan ini akan digunakan sebagai data awal dalam penyusunan laporan SPT, dan lampiran SPT. Penyusunan laporan keuangan akan dilaksanakan dalam 2 kali tatap muka. Targetnya adalah sampai WP UMKM mampu menyusun laporan keuangan. Tahap kedua, adalah pelatihan menyusun SPT. Dalam pelatihan menyusun SPT ini akan dilakukan simulasi pengisian SPT. Pada saat simulasi, maka yang digunakan adalah SPT manual. Namun, ketika data laporan keuangan sudah siap, langsung diaplikasikan ke dalam SPT tahunan dengan menggunakan E-form dan E-filling.
4. Tahap Pendampingan
Pada tahap pendampingan ini akan didampingi secara personal, mulai dari mengidentifikasi transaksi – transaksi yang telah dilakukan, menyusun pembukuan sederhana, hingga menyusun laporan keuangan. Berikutnya adalah mengidentifikasi

poin – poin yang harus diisi, dokumen – dokumen yang harus dilampirkan, dan bagaimana prosedur mengisi E-SPT secara online.

5. Evaluasi

Pada tahap evaluasi akan dievaluasi keberhasilan program pendampingan ini. Mulai dari tahap sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan. Hasil dari evaluasi ini akan digunakan sebagai referensi untuk menemukan model pendampingan WP UMKM yang efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunitas UMKM Belimbing beranggotakan 70 orang. Dengan beragam jenis usaha, ada makanan dan minuman, batik, kerajinan tangan, dan retail. Lebih dari 50% anggota komunitas ini telah memiliki NPWP, namun jarang melaporkan SPT Tahunan, karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap kewajiban perpajakan. Dan menurut keterangan, belum pernah ada perwakilan dari DJP Kanwil setempat yang datang ke komunitas ini untuk melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pemenuhan kewajiban perpajakan. Dan rata-rata anggota komunitas UMKM ini belum melakukan pembukuan atau pencatatan aktivitas ekonomi dalam usaha yang dijalankan. Sehingga pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan, sulit dilakukan. Pemilik UMKM hanya berpikir bagaimana memproduksi dan menjual produk kepada konsumen. Tanpa mengetahui apakah operasional perusahaan yang telah berjalan, efektif atau tidak. Karena tidak pernah ada catatan terkait pemasukan dan pengeluaran kas, pemasukan dan pengeluaran bahan baku, sehingga sulit dilakukan evaluasi. Oleh sebab itu, pelatihan terkait penyusunan laporan keuangan sederhana sangat diperlukan.

Kegiatan Pengabdian masyarakat ini dilakukan selama 3 bulan, mulai bulan Januari 2022 sam bulan Maret 2022. Waktu ini dipilih karena ketentuan UU Perpajakan, batas maksimal melaporkan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi adalah 31 Maret. Berikut adalah dokumentasi pembukaan dan sosialisasi kegiatan pengabdian masyarakat di Komunitas UMKM Belimbing.

Gambar 1. Dokumentasi pembukaan dan sosialisasi

Kegiatan pembukaan dan sosialisasi ini dihadiri oleh 45 orang anggota komunitas UMKM. Karena masih dalam situasi pandemic covid-19 dalam melaksanakan kegiatan ini tetap mengedepankan protokol kesehatan. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Aula Kantor Kelurahan Belimbing. Dalam kegiatan sosialisasi ini, tim pengabdian menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan pengabdian ini, timeline kegiatan pengabdian, dan macam – macam kegiatan yang akan dilaksanakan, serta teknis pelaksanaannya.

Gambar 2. Dokumentasi Penyuluhan Laporan Keuangan dan Pajak untuk UMKM.

Setelah tim pengabdian melakukan sosialisasi kepada UMKM, tahapan berikutnya adalah melakukan penyuluhan, sebagaimana terdokumentasi dalam gambar 2. Pada tahap penyuluhan ini, tim pengabdian menyampaikan terkait dengan urgensi penyusunan laporan keuangan, kewajiban perpajakan, urgensi pelaporan SPT, dan ketentuan pelaporannya. Seperti halnya dialami oleh kebanyakan pelaku UMKM, penyusunan laporan keuangan adalah hal yang ribet dan sangat menyita waktu. Mengingat dalam UMKM berlaku “one man show” artinya satu orang sebagai pemilik, pengelola, orang yang memproduksi, dan sekaligus pemasar produk yang dihasilkan. Apalagi kalau harus membuat laporan keuangan, maka tambah lagi tugasnya yaitu mencatat setiap transaksi ekonomi yang dilakukan. Sehingga tak ayal merekapun mengeluh kerepotan dan tidak sempat meluangkan waktu untuk membuat pembukuan. Namun dalam penyuluhan ini, telah tim pengabdian

sampaikan urgensi laporan keuangan, dan manfaatnya ketika UMKM punya laporan keuangan. Salah satunya adalah efisiensi penggunaan sumberdaya yang dimiliki. Dengan adanya pembukuan, maka setiap transaksi ekonomi yang terjadi, telah terdokumentasi. Dan ini merupakan data, sebagai bahan evaluasi bagi pengelola usaha, untuk melihat seberapa efektif penggunaan sumberdaya yang dilakukan. Dari pembukuan, dapat dilihat berapa rupiah biaya penggunaan bahan baku dalam suatu produk, apakah sudah efektif penggunaan bahan baku tersebut. Berapakah biaya iklan yang telah dikeluarkan, dan seberapa efektif iklan tersebut. Dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Dimana salah satu manfaat terpentingnya adalah akses tambahan modal, baik melalui bantuan pemerintah (melalui dinas Koperasi dan UMKM) maupun pembiayaan perbankan. Karena untuk bisa mendapatkan pembiayaan, salah satu yang disyaratkan adalah melampirkan laporan keuangan. Selain itu laporan keuangan juga sangat dibutuhkan untuk menghitung pajak yang harus dibayarkan. Setiap pendapatan yang terdokumentasi dengan baik, akan menghasilkan perhitungan pajak terutang yang akurat.

Gambar 3. Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam gambar 3. Adalah kegiatan pelatihan penyusunan laporan keuangan, dengan pembukuan sederhana. Dimulai dari mengumpulkan bukti transaksi, berupa nota atau kwitansi. Dari bukti-bukti transaksi tersebut akan dilakukan identifikasi dan penggolongan transaksi. Transaksi digolongkan kedalam kelompok pendapatan, pembelian, modal dan beban. Untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan.

Dalam tahap ini rata-rata pelaku UMKM kesulitan, di dalam menggolongkan transaksi. Misalnya saja pembelian alat produksi, itu dimasukkan kedalam kelompok pembelian atau modal. Sehingga tim pengabdian harus menjelaskan lebih detail definisi dari setiap penggolongan akun. Selain itu pengabdian juga telah menyiapkan template sederhana untuk bisa dijadikan pedoman bagi UMKM dalam melakukan pembukuan.

Gambar 4. Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan

Setelah tahapan pelatihan, berikutnya adalah pendampingan pelaporan SPT Tahunan. Dari laporan keuangan, bisa diketahui berapa penghasilan per tahunnya, sehingga bisa dihitung berapa pajak yang harus dibayar. Rata-rata UMKM di komunitas ini adalah berbentuk usaha perorangan, sehingga masuk ke dalam kategori wajib pajak Orang Pribadi. Untuk itu skema perhitungan yang diterapkan adalah perhitungan untuk wajib pajak Orang Pribadi, dengan SPT Tahunan jenis formulir 1770. Pelaporan SPT tahunan secara online dengan menggunakan E-Form. Karena ada pelaku UMKM yang baru lapor SPT tahun ini sehingga belum memiliki E-Fin, maka tim pengabdian juga mendampingi pengurusan E-Fin. E-Fin adalah nomor identitas wajib pajak terbitan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). E-Fin digunakan untuk mendaftar akun ke laman DJP Online, untuk bisa mengakses formulir yang dibutuhkan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Untuk itu, wajib pajak harus memiliki nomor E-Fin terlebih dahulu agar bias melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pendaftaran nomor E-Fin difasilitasi secara kolektif oleh tim pengabdian. Dalam pendampingan pelaporan SPT Tahunan ini, tim pengabdian mendampingi UMKM mulai dari menghitung pajak terutang, membayar pajak terutang, mendaftar E-Fin dan aktivasi akun DJP Online, dan pengisian SPT Tahunan, sampai mendapatkan bukti pelaporan SPT Elektronik. Pendampingan dilakukan secara personal, di tempat masing-masing UMKM.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan pada komunitas UMKM kelurahan Blimbing, kota Malang. Dengan tujuan memberikan pelatihan dan pendampingan pada UMKM agar dapat menyusun laporan keuangan sederhana, dan melaporkan pajak penghasilan, dengan mengisi SPT Tahunan. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kepatuhan UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang kewajiban perpajakan.

Kegiatan Pengabdian masyarakat ini dilakukan selama 3 bulan, mulai bulan Januari 2022 sampai bulan Maret 2022. Waktu ini dipilih karena ketentuan UU Perpajakan, batas maksimal melaporkan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi adalah 31 Maret. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam 5 (lima) tahapan, yaitu tahap sosialisasi, tahap penyuluhan, tahap pelatihan, tahap pendampingan, dan evaluasi.

Kegiatan pengabdian ini berjalan dengan baik, dan mendapatkan respon positif dari pelaku UMKM, maupun mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan pengabdian ini. Setelah mengikuti kegiatan pengabdian ini, mahasiswa memperoleh kepiawaian dalam menyusun laporan keuangan UMKM, menghitung dan melaporkan pajak. Serta pengalaman untuk pengembangan diri dan menambah jaringan. Pelaku UMKM yang berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian ini, memperoleh tambahan pengetahuan dan pemahaman tentang cara penyusunan laporan keuangan, menghitung pajak, membayar pajak, dan melaporkan pajak dengan menggunakan aplikasi e-filing. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak UMKM pun meningkat. UMKM juga dapat efisiensi pengelolaan sumber daya keuangannya, dengan pencatatan laporan keuangan yang sederhana, dan mudah dilakukan.

Program pengabdian kepada masyarakat ini perlu ditingkatkan, selain pendampingan penyusunan laporan keuangan, juga perlu adanya pendampingan dalam hal menghitung harga pokok produksi atau harga pokok penjualan. Karena berdasarkan pengalaman selama kegiatan pengabdian berlangsung, pelaku UMKM masih kesulitan dalam menentukan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan, terutama ketika ada pesanan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, I., Sari, N., & Muhamad, I. (2020). Determinan Kemauan Pelaku UMKM menjadi WP. *Sentralisasi*, 9(1), 36–44.
- Akram, M. S., Shareef, M. A., & Malik, A. (2016). *Exploring the interrelationships between technological predictors and behavioral mediators in online tax filing: The moderating role of perceived risk*. 1–46.
- Aneswari, Y. R. (2018). Membongkar Imperialisme dalam Kebijakan Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *InFestasi*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v14i1.4246>
- Antika, F. N., Mulyani, S., & Budiman, N. A. (2021). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kudus. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 16(1), 15–28. <https://jkaa.bunghatta.ac.id/index.php/JKAA/article/view/32>
- Depi, N. S. (2021). Determinan Penggunaan E-Form untuk Pelaporan Pajak. *In Universitas Islam Indonesia*.
- Galih, S. S. (2020). *Determinan Kepatuhan WP OP UMKM di Surakarta*.

- Gupta, K., & Arora, N. (2019). *Investigating consumer intention to accept mobile payment systems through unified theory of acceptance model An Indian perspective*. 2016. <https://doi.org/10.1108/SAJBS-03-2019-0037>
- Prasetio, A. B., & Andespa, R. (2021). Evaluasi Tingkat Kepatuhan WP UMKM pd Masa Pandemi covid 19. *Jurnal Ekonomi Volume 18, Nomor 1 Maret201, 2(1)*, 41–49.
- Mardiana, M., Nursaputri, P., & I'zzaty, R. D. (2020). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Dalam Menggunakan Sistem E-Filling*. *IJAcc, 1(1)*, 53–59. <https://doi.org/10.33050/jakbi.v1i1.1380>
- Marlinah. Lilih. (2021). Jurnal IKRA-ITH Ekonomika Vol 4 No 2 Bulan Juli 2021 Jurnal IKRA-ITH Ekonomika Vol 4 No 2 Bulan Juli 2021. *Memnfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemuliahan Ekonomi Nasional, 4(98)*, 73–78.
- Nandiroh, U. (2021). Exploration of Non-compliance of Micro, Small and Medium Business Taxpayers: Phenomenology Study. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi Dan Perpajakan (Jemap), 4(2)*, 272. <https://doi.org/10.24167/jemap.v4i2.3320>
- Nisa, Z., Diana, N., & Junaidi. (2020). Determinan Pemanfaatan Pmk 44 Insentif Pajak Oleh Wajib Pajak Umkm (Studi Kasus Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP Malang Utara). *E-Jra, 09(02)*, 47–57.
- Noch, M. Y., & Pattiasina, V. (2017). *Persepsi Risiko Dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan Sistem E-Filling (Survei Pada Kpp Pratama Jayapura) Pajak Terhadap Penggunaan Sistem E-Filling*. November.
- Putra, W. E., Mirdah, A., & Siregar, P. Y. (2020). Determinan Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Dalam Penggunaan E-Filing. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan), 4(2)*, 173. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v4i2.204>
- Rahi, S., Mustafa, M., Mansour, O., Alghizzawi, M., & Alnaser, F. M. (2019). *Integration of UTAUT model in internet banking adoption context*. <https://doi.org/10.1108/JRIM-02-2018-0032>
- Ramadani, M., & Lutfillah, N. Q. (2020). Determinan minat penggunaan E-SPT. *Jurnal Akuntansi Kontemporer, 12(1)*, 1–9. <https://doi.org/10.33508/jako.v12i1.2129>
- Safriansyah, S., & Asiah, A. (2018). Determinan Faktor-faktor Penggunaan S-Filling Terhadap Peningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Dosen PTS di Banjarmasin). *Jurnal Ilmiah, 8(2)*, 79–90. <http://journal.stiei-kayutangi-bjm.ac.id/index.php/jibk/article/view/447>
- Sari, R. (2018). Kebijakan Insentif Pajak Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 10(12)*, 19–24. berkas.dpr.go.id

Sugihanti, winna titis. (2011). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Perilaku Wajib Pajak Untuk Menggunakan E-Filling (Studi Empiris pada Wajib Pajak Badan Kota Semarang). *Skripsi*, 20–83.

Tjen, C. (n.d.). *Trust , Information System Quality and Perceived Net Benefit : A Study on the Use of Tax e-Filing in Indonesia*. 1–17.

Ulfa, fadhila rahma. (2020). *Determinan minat penggunaan e-filling: pendekatan unified theory of acceptance and use of technology (utaut) (Issue 1116 29000)*.